SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 229 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP ONLINE

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan dan memelihara penggunaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online, perlu dibentuk Tim Teknis Pengembangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan Menteri...../3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah Nomor: 900.1.13 / 332 / BPPKAD / 2023 tanggal 9 Oktober 2023 Hal: Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengembangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyiapkan rancang bangun, mengembangkan dan memelihara database, aplikasi dan jaringan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honor setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023.

KELIMA:...../4

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 229 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 DESEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONOR TIM TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP ONLINE

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR /BULAN
1	KEPALA BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Pengarah	Rp. 1.250.000,-
2	SEKRETARIS BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Ketua Tim	Rp. 1.000.000,-
3	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN Provinsi Papua Tengah	Anggota	Rp. 750.000,-
4	KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Provinsi Papua Tengah	Anggota	Rp. 750.000,-
5	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPENDA Provinsi Papua	Anggota	Rp. 750.000,-
6	KASUBID PERENCANAAN PENDAPATAN BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota	Rp. 750.000,-
7	KASUBID VERIFIKASI PENDAPATAN BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota	Rp. 750.000,-
8	KASUBID PROGRAM DAN PERENCANAAN BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota	Rp. 750.000,-
9	KASUBID PADA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPENDA Provinsi Papua	Anggota	Rp. 750.000,-
10	KASUBID PADA BIDANG PAJAK BAPPENDA Provinsi Papua	Anggota	Rp. 750.000,-
11	KASUB BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota	Rp. 750.000,-
12	FRANSISKUS XAVERIUS INDRA, S.KOM., BAPPENDA Provinsi Papua	Senior Programmer	Rp. 3.000.000,-
13	YHEZKIEL WELLY MAINOLLO, S.KOM., BAPPENDA Provinsi Papua	Programer	Rp. 2.250.000,-

14. Paulus...../2

14	PAULUS AFRIANTO, S.KOM., BAPPENDA Provinsi Papua	Junior Programmer	Rp. 2.000.000,-
15	AMBROSIUS DONNY WIBOWO, S.KOM., BAPPENDA Provinsi Papua	IT Support	Rp. 2.000.000,-
16	UMAR JAYA WIRA ADI KUSUMA, S.KOM., BAPPENDA Provinsi Papua	IT Support	Rp. 2.000.000,-

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006